

Pengaruh *CEO tenure, feminism in director, dan conservatism* terhadap *tax avoidance* perusahaan properti dan *real estate* tahun 2021-2023

Gracia Sherlytta Valensia *, Rahma Maulidia, Syarbini Ikhsan

AKURASI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

117

Abstract

Many companies employ strategies to avoid tax liabilities by reducing their tax burden and minimizing their tax liabilities. Weaknesses in tax regulations can be used by these companies to offload their tax liabilities. The purpose of this research is to investigate the impact of factors such as CEO tenure, the existence of women on the board, and the practice of accounting conservatism on tax avoidance. This research investigates companies within the property and real estate sector that are registered on the IDX between 2021-2023. A quantitative approach was employed in this study, utilizing secondary data from company annual reports retrieved from the IDX website and the company's official website. The research adopted purposive sampling for selecting 69 observations. Data processing was carried out using the SPSS 25.0 application. This study found that neither CEO tenure nor the existence of female directors had a significant impact on tax avoidance. However, conservative accounting practices are shown to have a positive and significant impact on tax avoidance.

Received 5/22/2024
Revised 5/27/2024
Accepted 5/29/2024
Online First 6/20/2024

Public interest statements

These findings can be utilized by companies in two ways. First, when recruiting leadership, experience or gender diversity alone may not be the strongest indicators to minimize the tax burden. Secondly, the results of this study suggest that tax authorities may need to be more vigilant and selective in their supervision to ensure all taxpayers comply with their tax obligations.

Keywords: *Tax Avoidance, CEO Tenure, Feminism in Director, Conservatism*

Paper type: Research paper

✉ Corresponding:

Gracia Sherlytta Valensia

Email: graciasherlytta@gmail.com



© The Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).use.



AKURASI: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 6, No. 2, 2024, 117-130
eISSN 2685-2888.

Abstrak

Banyak perusahaan yang melakukan strategi untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan cara mengurangi beban pajak dan meminimalkan kewajiban pajak mereka. Kelemahan dalam regulasi perpajakan dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk melepas kewajiban pajak mereka. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak dari faktor-faktor seperti masa jabatan CEO, eksistensi wanita dalam dewan direksi, dan praktik konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Fokus penelitian ini tertuju pada perusahaan properti dan real estate yang terdata di BEI selama periode 2021-2023. Kuantitatif dipilih sebagai metode penelitian dengan memanfaatkan data sekunder terkait laporan tahunan perusahaan yang tersaji di situs BEI dan situs resmi perusahaan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih 69 observasi. Olah data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 25.0. Penelitian ini menemukan bahwa baik masa jabatan CEO maupun keberadaan direktur wanita tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, praktik akuntansi konservatif terbukti memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak

Pernyataan kepentingan publik

Temuan ini dapat digunakan oleh dua cara. Pertama, ketika merekrut kepemimpinan, pengalaman atau keragaman gender saja mungkin bukan merupakan indikator terkuat untuk meminimalkan beban pajak. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak mungkin perlu lebih waspada dan selektif dalam pengawasan mereka untuk memastikan semua wajib pajak mematuhi kewajiban pajak mereka

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Masa Jabatan Direktur, Feminisme dalam Direksi, Konservatisme Akuntansi

PENDAHULUAN

Penerimaan tertinggi negara Indonesia sebagian besar diperoleh dari pungutan pajak. Manfaat pajak dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara secara langsung maupun tidak langsung. Negara memanfaatkan pajak untuk membiayai pembangunan fasilitas yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat. Kestabilan ekonomi negara juga dapat dikontrol oleh pajak, dimana fungsi pajak sebagai alat retribusi pendapatan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui siaran pers yang dihadiri oleh Menko Airlangga pada Oktober 2023, diketahui bahwa sektor properti dan real estate berhasil menyumbang penerimaan negara kurang lebih 2.865 triliun rupiah per tahun terhadap PDB periode 2018-2022. Sektor properti dan real estate berkontribusi sebesar Rp185 triliun pada penerimaan pajak (Limanseto, 2023).

Regulasi pajak bersifat memaksa dan menuntut agar wajib pajak menuntaskan kewajibannya sesuai dengan regulasi perpajakan yang telah disahkan. Di sisi lain, beberapa wajib pajak berpendapat bahwa membayar pajak sama dengan mengurangi pendapatan atau laba mereka. Dilema ini tidak membuat wajib pajak segan dalam melancarkan praktik yang menghindari kewajibannya. Denda perpajakan pada regulasi yang disahkan tidak membuat wajib pajak berhenti bersikap acuh tak acuh atas kewajibannya. Melihat fenomena ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan fasilitas insentif pajak yang dapat membantu mengecilkan beban pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Penerapan kebijakan ini diharapkan dapat membuat wajib pajak lebih patuh pada regulasi, walaupun pada realitanya beberapa wajib pajak tetap tidak menjalankan kewajibannya dengan baik (Handayani et al, 2024). Dalam dunia bisnis, perusahaan akan berfokus pada peningkatan kualitas laba guna menarik perhatian investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Strategi yang diambil perusahaan dalam

menghindari pajak dapat berupa tax avoidance (legal) dan tax evasion (ilegal). Perusahaan dapat memanfaatkan kelemahan yang ada dalam kebijakan perpajakan, yang dikenal dengan sebutan taxloopholes. Bentuk implementasi tax avoidance dapat berupa pemisahan omset dengan membangun perusahaan baru, memindahkan beberapa biaya ke kategori bukan objek pajak, dsb. Tax avoidance dapat diimplementasikan selama perusahaan dapat menjelaskan secara legal tindakannya, walaupun secara etika hal ini dianggap tidak etis untuk diterapkan.

Sebelumnya pada tahun 2016, perusahaan sektor properti ternama PT Agung Podomoro Land Tbk tersandung kasus yang diindikasikan terdapat praktik tax avoidance (penghindaran pajak). International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) berhasil mengungkapkan dokumen rahasia milik firma hukum Mossack Fonesca di Panama. Dokumen ini berisikan daftar nama klien yang diduga ingin menyembunyikan uang mereka agar tidak terdeteksi oleh instansi pajak di negaranya, dokumen ini disebut Panama Papers. Dokumen yang tersimpan selama empat puluh tahun lamanya ini berisi kurang lebih 2.961 nama individu dan perusahaan di Indonesia. Tidak hanya PT Agung Podomoro Land Tbk, sejumlah perusahaan lain seperti Agung Sedayu, Lippo, Astra International, dsb, juga tercantum dalam Panama Papers (Rizal, 2016). Kemudian, terdapat kasus lain yang dialami oleh PT CFLD Tangerang New Industry City Development, dimana terdapat sejumlah biaya yang seharusnya dikoreksi namun oleh PT CFLD Tangerang New Industry City Development tetap dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan 2017. Objek PPh Final 4 (2) yang menjadi sengketa pajak sebesar Rp 13.333.901.293, dengan PPh Final 4 (2) terutang sebesar Rp 1.712.113.162. Pihak perusahaan sudah mengajukan banding atas koreksi biaya tersebut, namun perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa koreksi biaya yang dilakukan Dirjen Pajak tidak tepat. Dengan begitu PT CFLD Tangerang New Industry City Development harus menyetorkan PPh kurang bayar beserta sanksi administrasinya sebesar Rp. 2.396.958.427 (Sekretariat Pengadilan Pajak, 2023).

Faktor internal dan eksternal perusahaan berperan penting untuk mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menerapkan praktik tax avoidance. Kekuasaan CEO atau direktur perusahaan dalam mengambil keputusan menjadi faktor internal yang mempengaruhi keberlanjutan kegiatan operasional perusahaan. Loyalitas seorang CEO dapat dilihat dari seberapa lama CEO tersebut menjabat dalam sebuah perusahaan, aspek ini dianggap akan menurunkan tindakan oportunistik CEO dalam membuat keputusan. Dalam penelitian (Noviawan & Utamie, 2020), (Bianca & Tang, 2018), dinyatakan bahwa masa jabatan direktur tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap praktik tax avoidance. Sebaliknya, menurut (Doho & Santoso, 2020), (Dewi et al, 2023), antara masa jabatan direktur dengan praktik tax avoidance terdapat pengaruh yang signifikan.

Menurut Brammer et al (2007) dalam Aurellia & Sambuaga (2022), kehadiran wanita dalam susunan dewan perusahaan menunjukkan adanya kesejajaran gender dalam perusahaan, tentunya hal ini berdampak pada peningkatan reputasi dan nilai perusahaan. Dewan wanita mampu mempengaruhi dan memberikan keputusan terkait perpajakan, serta memberikan pandangan dalam upaya menghindari resiko dalam membuat keputusan (Hudha & Utomo, 2021). Sedangkan menurut hasil penelitian Mala & Ardiyanto (2021), Sinduarta & Hapsari (2022), menyatakan bahwa diversitas gender tidak mempengaruhi tax avoidance. Penelitian Mala & Ardiyanto (2021), mengungkapkan baik direksi pria maupun wanita bertindak profesional dan bertanggung jawab atas perusahaan.

Akuntansi konservatif adalah sikap seorang akuntan yang mempertimbangkan beberapa opsi atau alternatif ketika menyiapkan laporan keuangan. Kondisi tersebut membuat akuntan cenderung memilih opsi yang meningkatkan kekayaan dan pendapatan lebih sedikit (Sari et al,

2016). Penelitian sebelumnya oleh Pravita et al (2022), Sari et al (2016), berpendapat bahwa konservatisme akuntansi tidak berdampak kepada praktik tax avoidance. Namun hasil pengujian oleh Sarra (2017), Rosdiani & Hidayat (2020), memperlihatkan konservatisme akuntansi memiliki dampak terhadap praktik tax avoidance.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi dan kesejangan terkait dampak beberapa aspek pada praktik tax avoidance. Fokus penelitian tertuju pada perusahaan properti dan real estate yang terdata di BEI pada periode 2021-2023, untuk mengkaji dampak CEO tenure, feminism in director, dan conservatism terhadap tax avoidance. Sektor properti dan real estate yang semakin mengalami kemajuan dan berkontribusi dalam penerimaan negara, menjadi alasan peneliti memilih sektor ini.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Upper Echelon Theory

Dalam teori upper echelon dijelaskan bahwa seorang direktur utama (CEO) dengan periode jabatan yang lama lebih mampu dalam menentukan keputusan strategis, sehingga sering terlibat dalam perencanaan pajak. Seorang direktur yang sudah menjabat lama dianggap lebih memahami kondisi perusahaan, terutama celah untuk mengecilkan beban pajak (Jbir et al, 2021) dalam (Dewi et al, 2023). Beberapa karakteristik manajemen puncak yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan seperti, usia, gender, pengalaman kerja, pendidikan, dan posisi keuangan. CEO yang inovatif akan cenderung mengambil langkah strategi penghindaran pajak yang baru dan kompleks (Dewi et al, 2023).

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah perbuatan legal yang dijalankan perusahaan untuk menghindari pajak sesuai dengan regulasi perpajakan, wajib pajak akan memanfaatkan celah yang ada pada regulasi perpajakan (Muslim & Fuandi, 2023). Besaran tax avoidance pada perusahaan dapat dianalisis melalui ETR. ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan belum optimal dalam memanfaatkan kebijakan pajak dan mengantongi beban pajak yang signifikan. Kebalikannya, ETR yang rendah menandakan bahwa perusahaan telah memanfaatkan insentif pajak dengan efektif dan berhasil menekan beban pajaknya. (Tanjaya & Nazir, 2021).

CEO Tenure

Chief Executive Officer (CEO) atau direktur utama merupakan seseorang yang bertanggungjawab atas pengambilan keputusan dan keberhasilan operasional perusahaan. CEO tenure mencerminkan lama masa kerja CEO di sebuah perusahaan, yang mempunyai dua implikasi utama terhadap kebijakan (Siren et al, 2018). Periode jabatan (tenure) menjadi ciri CEO yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan setiap langkah yang diambil perusahaan termasuk menyusun strategi tax avoidance (Bianca & Tang, 2018).

Feminism in Director

Menurut Arfken et al (2004) dalam Aurellia & Sambuaga (2022), diversitas berperan penting dalam rangkaian bisnis karena melalui kesenjangan pada fungsi, perusahaan dapat menciptakan diversitas ide dan pengalaman yang berkualitas untuk perusahaan. Kehadiran wanita sebagai

anggota dewan merupakan salah satu bentuk diversitas dalam perusahaan. Teori feminisme mengusulkan bahwa partisipasi direktur perempuan di perusahaan dapat mengubah pola pengambilan keputusan, termasuk dalam hal perpajakan (Putra et al, 2018) dalam (Tanujaya & Anggreany, 2021).

Conservatism

Prinsip konservatisme akuntansi menurut Sugiono, Soenarno & Kusumawati (2010) dalam Sarra (2017), merupakan kondisi dimana pencatatan harga aset perusahaan berada di bawah harga perolehan aset sehingga dapat dikatakan pencatatan utang yang melebihi nilai seharusnya serta pengakuan probabilitas kerugian yang terealisasi tanpa memperhatikan keuntungan di masa mendatang. Menurut Siren et al (2018) masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan CEO memiliki pengaruh lebih besar terhadap pemangku kepentingan (stakeholders). Semakin lama seorang CEO bekerja di sebuah perusahaan, maka akan semakin dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan. Hal itu membuat direktur cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan pemangku kepentingan, dengan cara melakukan penghindaran pajak untuk menaikkan laba perusahaan. Selain itu, menurut Ali & Zhang (2015) dalam Noviawan & Utamie (2020), umumnya CEO pada awal periode lebih termotivasi untuk meningkatkan laba perusahaan agar dapat mengubah pandangan pasar terkait keraguan pasar terhadap kemampuan CEO. Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu upaya CEO untuk meningkatkan reputasinya, dimana hal tersebut juga menguntungkan perusahaan dan shareholders. Dalam penelitian Doho & Santoso (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO tenure memiliki dampak positif terhadap praktik tax avoidance. Risiko perusahaan untuk diperiksa pihak fiskus akan semakin berkurang jika seorang CEO menjabat dalam periode yang lama. Selain itu, hasil penelitian (Dewi et al, 2023) juga menyatakan bahwa masa jabatan seorang direktur utama mempengaruhi kemampuannya dalam mengambil keputusan.

H1: *CEO Tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

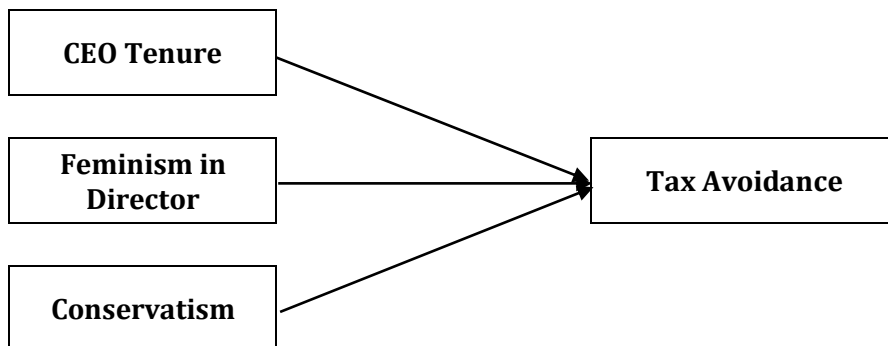
Menurut Gul et al (2011) dalam Tanujaya & Anggreany (2021), kesenjangan gender dalam susunan direksi dapat mendorong kualitas dewan dalam pelaksanaan terkait inspeksi, pemilahan saat mengungkap dan melaporkan laporan keuangan, serta pemeriksaan yang ketat ketika penentuan keputusan. Kehadiran direksi wanita diyakini memberikan dampak pada peningkatan transparansi dan kepercayaan dalam dewan. Alasan yang mendasari pernyataan terkait adalah sifat alamiah wanita yang cenderung menjauhi risiko, beretika dan bermoral tinggi, berpikir secara independen, dan tepat dalam pembuatan keputusan. Eksistensi wanita dalam dewan direksi dibutuhkan karena secara signifikan dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak (Hoseini & Gerayli, 2018). Penelitian terdahulu oleh Tanujaya & Anggreany (2021), Hoseini & Gerayli (2018), Aurellia & Sambuaga (2022) menyatakan diversitas gender berdampak negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian membuktikan keberadaan wanita dalam dewan perusahaan mampu menurunkan praktik penghindaran pajak. Perspektif terkait perusahaan diyakini telah menaati regulasi yang ada, didasari sifat direksi wanita yang cenderung lebih mematuhi peraturan.

H2: *Feminism in director* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Baharudin & Wijayanti (2011) dalam Sarra (2017), tingkat konservatisme dalam pelaporan keuangan perusahaan bergantung pada dedikasi manajemen untuk menghasilkan

kualitas informasi keuangan yang valid, akurat, dan bebas dari misinformasi bagi investor. Secara tidak langsung conservatism akan berdampak pada laporan yang dihasilkan perusahaan akan dijadikan sebagai acuan oleh manajemen dalam membuat kebijakan terkait strategi tax avoidance. Implementasi praktik tax avoidance dalam sebuah perusahaan tentu dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh direktur (Budiman & Setyono, 2012) dalam (Sari et al, 2016). Metode conservatism dalam tax avoidance diimplementasikan dengan menurunkan beban pajak terutang, karena conservatism akan mengakui beban terlebih dahulu namun pendapatan tidak langsung diakui (Jaya et al, 2013) dalam (Sundari & Aprilina, 2017). Hasil penelitian Sarra (2017), Rosdiani & Hidayat (2020), menyatakan bahwa konsetvatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keinginan manajemen dalam memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, serta berupaya untuk mencari cara menurunkan laba perusahaan yang nanti akan dilaporkan.

H3: *Conservatism* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

METODE

Metode kuantitatif-eksplanatif dipilih untuk mengkaji pengaruh faktor-faktor yang ada pada penelitian. Pemanfaatan data sekunder berupa laporan tahunan emiten sektor properti dan real estate yang tersaji di situs BEI dan situs resmi perusahaan, serta data diolah menggunakan SPSS Statistics 25.0. Berikut kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian:

Tax Avoidance

Tingginya nilai ETR perusahaan menggambarkan keadaan perusahaan yang jarang melakukan praktik tax avoidance, sebaliknya jika nilai ETR rendah maka dapat disimpulkan perusahaan sering melakukan praktik tax avoidance (Tanjaya & Nazir, 2021). Berikut ini rumus untuk menghitung ETR dalam penelitian Hoseini & Gerayli (2018):

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

No	Kriteria Sampel	Jumlah
1	Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023	89
2	Perusahaan properti dan real estate yang baru terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023	(14)
3	Perusahaan properti dan real estate yang tidak menerbitkan annual report lengkap selama periode 2021-2023	(16)
4	Perusahaan properti dan real estate yang mengalami kerugian selama periode 2021-2023	(30)
5	Perusahaan properti dan real estate yang memiliki beban pajak positif	(6)
Perusahaan yang memenuhi kriteria		23
Total sampel yang digunakan (23 x 3 tahun)		69

Tabel 1.*Kriteria Pemilihan Sampel***CEO Tenure**

Menurut Siren et al (2018), CEO tenure diukur melalui berapa lama seseorang menjabat sebagai CEO atau direktur utama dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dapat dihitung berdasarkan jumlah tahun menjabat sejak ditunjuk menjadi seorang CEO.

Feminism in Director

Pengukuran feminisme in director atau feminisme dalam dewan direksi dilakukan dengan melihat eksistensi direksi wanita dalam jajaran dewan perusahaan. Dengan memanfaatkan variabel dummy, jika dalam susunan dewan direksi perusahaan terdapat anggota direksi wanita maka diperoleh nilai 1 (satu), dan nilai 0 (nol) diberikan apabila tidak terdapat direksi wanita (Hoseini & Gerayli, 2018).

Conservatism

Conservatism (konservatisme) diukur dengan menggunakan rumus akrual non operasi. Akrual non-operasional dihitung berdasarkan total aset perusahaan sebelum disusutkan, dan tidak memperhitungkan arus kas operasional yang dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan (Afriani et al, 2021). Berikut rumus untuk mengukur conservatism dalam penelitian Afriani et al (2021):

$$\text{Total Akrual} = \frac{((\text{Laba Bersih} + \text{Depresiasi}) - \text{Arus Kas Operasi})(-1)}{\text{Total Aset}}$$

Teknik Analisis Data

Analisis regresi linear berganda diterapkan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Metode ini menghasilkan output berupa koefisien determinasi, uji t (parsial), dan uji f (simultan). Berikut ini model persamaan analisis regresi berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y: Tax Avoidance

X1: CEO Tenure

X2: Feminism in Director

X3: Conservatism

ε: Error (tingkat kesalahan pengganggu)

HASIL DAN DISKUSI

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan Tabel 3, hasil statistik deskriptif diketahui penelitian ini memiliki 57 sampel observasi yang dapat dilihat pada kolom N. Nilai minimum menunjukkan nilai terkecil masing-masing variabel dan mengindikasikan besar kemungkinan terjadi praktik tax avoidance. Kemudian untuk nilai maksimum merupakan nilai terbesar masing-masing variabel dan mengindikasikan kecil kemungkinan terjadi praktik tax avoidance. Nilai mean merupakan nilai rata-rata untuk setiap variabel yang menunjukkan tingginya kemungkinan terjadinya praktik tax avoidance.

Tabel 3.

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
CEO Tenure	57	0,500	25,000	502,500	8,816	7,109
Feminism in Director	57	0,000	1,000	40,000	0,700	0,462
Conservatism	57	-0,074	0,071	0,453	0,008	0,029
Tax Avoidance	57	0,002	0,379	9,213	0,162	0,080

CEO tenure memperoleh nilai min. 0,5 tahun dan nilai maks. 25 tahun. Rata-rata CEO tenure adalah 8,816, dengan standar deviasi 7,1092, yang berarti perusahaan dalam sampel observasi umumnya memiliki CEO dengan masa jabatan yang relatif lama. Feminism in director memperoleh nilai min. 0 (nol) dan nilai maks. 1 (satu). Rata-rata tingkat feminisme di jajaran direksi adalah 0,7, serta standar deviasi 0,462, yang berarti perusahaan dalam sampel observasi umumnya memiliki anggota direksi wanita dalam susunan dewan direksi, sehingga tercipta keragaman gender di dalamnya. Conservatism memperoleh nilai min. -0,074 dan nilai maks. 0,071. Rata-rata tingkat konservatisme adalah 0,00795, dengan standar deviasi 0,028526, yang berarti implementasi prinsip konservatisme pada perusahaan sampel penelitian ini relatif sedikit. Tax avoidance memperoleh nilai min. 0,002 dan nilai maks. 0,379. Rata-rata tingkat tax avoidance adalah 0,16163, dengan standar deviasi 0,080233, yang berarti praktik tax avoidance pada perusahaan sampel tidak berbeda jauh.

Uji Normalitas

Uji normalitas dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan uji asumsi klasik yang mengidentifikasi bahwa variabel telah mengikuti pola distribusi yang normal. Hasil pengujian dapat diterima jika data telah didistribusikan dengan normal. Menurut hasil sebelum outlier memperlihatkan data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 (<0,05). Oleh karena itu, terdapat beberapa data outlier yang dihapus sebanyak 12 sampel observasi nomor 3, 6, 21, 22, 25, 35, 40, 43, 45, 48, 63, dan 66. Selanjutnya tersisa 57 sampel observasi yang kemudian dilakukan pengujian kembali, hasilnya mengindikasikan distribusi data penelitian menjadi normal setelah outlier dihilangkan, dengan memperoleh nilai signifikan dalam uji

normalitas sebesar 0,200 ($>0,05$). $1,930 < 2,3155$, maka dapat dibuktikan bahwa data tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji Asumsi Klasik

Melalui uji multikolinearitas, dapat dianalisa hubungan antar variabel bebas dalam model regresi. Syarat pengujian ini $VIF < 10$ dan $tolerance > 0,10$, yang mengisyaratkan tidak terjadi situasi multikolinearitas. Berdasarkan, hasil uji menunjukkan nilai tolerance dari setiap variabel sebesar 0,992; 0,963; 0,967 ($>0,1$), sedangkan nilai VIF sebesar 1,008; 1,039; 1,035 (<10). Hal ini menandakan bahwa antar variabel tidak terjadi korelasi dan tidak mengalami gejala multikolinearitas. Dengan uji autokorelasi peneliti dapat mengidentifikasi keberadaan korelasi antar residual dalam model regresi pada periode waktu yang berbeda (t dan t-1). Apabila nilai Durbin-Watson (DW) terletak di tengah dU dan (4-dU), dapat dinyatakan tidak ada masalah autokorelasi. Menurut hasil uji yang memperlihatkan nilai DW = 1,930. Jumlah pengamatan (n) 57 dan jumlah variabel (k) 3, nilai dU = 1,6845 dan nilai (4-dU) = 2,3155. Karena nilai DW (1,930) berada diantaranya, yaitu $1,6845 < 1,930 < 2,3155$, maka dapat dibuktikan bahwa data tidak memiliki masalah autokorelasi.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi ketidaksamaan variance atau residual pada suatu pengamatan. Dengan menggunakan metode Spearman's Rho, jika nilai Sig. (2-tailed) pada kolom nilai residual $>0,05$ artinya tidak teridentifikasi masalah heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji menggunakan metode spearman's rho membuktikan nilai Sig. (2-tailed) dari setiap variabel sebesar 0,653; 0,986; 0,860 ($>0,05$). Hal ini menandakan nilai Sig. (2-tailed) ($>0,05$), disimpulkan tidak penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Hipotesis

	Hypothesis	β	SE	T-Statistics	Sig.
H1	CEO Tenure -> Tax Avoidance	-0,002	0,001	-1,203	0,234
H2	Feminism in Director -> Tax Avoidance	-0,032	0,023	-1,397	0,168
H3	Conservatism -> Tax Avoidance	0,913	0,364	2,506	0,015
	Adjusted R2 : 0,092				
	F-statistics : 2,884				
	F-sig. : 0,044				
	Jumlah observasi : 57				

Pengujian Hipotesis

Pada yang telah disajikan, dapat dilihat nilai Adjusted R2 = 0,092, nilai ini membuktikan kemampuan CEO tenure, feminism in director, dan conservatism untuk memaparkan tax avoidance hanya sebesar 9,2%, sedangkan sebesar 90,8% dipengaruhi variabel bebas yang lain. Kemudian terdapat uji t berfungsi untuk mengidentifikasi dampak masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen. Variabel independen dianggap berdampak terhadap variabel

dependen apabila nilai sig. lebih kecil dari 0,05. Hasil tabel berikut membuktikan CEO tenure tidak memengaruhi tax avoidance, memperoleh nilai sig. 0,234 ($>0,05$) sehingga H1 ditolak. Variabel feminism in director memperoleh nilai sig. 0,168 ($>0,05$) dinyatakan tidak memengaruhi tax avoidance, sehingga H2 ditolak. Conservatism dinyatakan memengaruhi tax avoidance, memperoleh nilai sig. 0,015 ($<0,05$) sehingga H3 diterima. Terakhir, hasil uji f membuktikan bahwa variabel CEO tenure, feminism in director, dan conservatism, bersama-sama secara simultan berdampak kepada tax avoidance dengan memperoleh nilai signifikans sebesar 0,044 ($<0,05$).

Pengaruh CEO tenure terhadap tax avoidance

Hasil temuan membuktikan tidak ditemukan kaitan signifikan antara CEO tenure dengan praktik tax avoidance di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya seorang CEO menjabat tidak berdampak pada kelancaran praktik tax avoidance dalam perusahaan. Maka dari itu, H1 yang berpendapat bahwa CEO tenure memengaruhi praktik penghindaran pajak ditolak. Hal ini searah dengan hasil penelitian Yuwono & Fuad (2019), yang menyatakan bahwa kemampuan CEO atau direktur utama perusahaan dalam mengambil keputusan dapat dilakukan oleh CEO dengan berbagai masa jabatan. Saat seseorang dilantik menjadi direktur utama di sebuah perusahaan, tidak menutup kemungkinan bahwa direktur tersebut sebelumnya sudah menduduki jabatan yang sama di perusahaan lain. Sehingga walaupun masa jabatan direktur utama tergolong singkat, namun pengalaman yang dimiliki direktur tersebut dari perusahaan sebelumnya cukup banyak, termasuk pengambilan keputusan penghindaran pajak. Alasan ini juga di dukung oleh data observasi yang menunjukkan di beberapa perusahaan direktur utama baru menjabat untuk periode pertama dan kedua.

Kemudian menurut hasil penelitan Nursida et al (2022), dikatakan bahwa direktur pada periode awal jabatan tidak melakukan tax avoidance untuk meningkatkan reputasi, melainkan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Tindakan ini merupakan salah satu upaya yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kepercayaan dari pemegang saham serta berpotensi untuk menambah masa menjabat dari seorang CEO. Berbeda dengan pendapat Dewi et al (2023), yang mengungkapkan CEO tenure berdampak positif terhadap tax avoidance. Direktur yang memiliki masa jabatan lebih lama diasumsikan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang perusahaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih efektif untuk mengurangi kewajiban pajak.

Pengaruh feminism in director terhadap tax avoidance

Hasil pengujian membuktikan bahwa feminism in director tidak berdampak terhadap praktik tax avoidance, yang artinya kehadiran direksi wanita tidak mengurangi maupun meningkatkan praktik tax avoidance yang terjadi dalam perusahaan. Maka dari itu, H2 yang menyatakan bahwa feminism in director berpengaruh terhadap tax avoidance ditolak. Penelitian ini sependapat dengan opini Mala & Ardiyanto (2021), yang menyatakan bahwa diversitas gender tidak berdampak terhadap praktik tax avoidance. Pemilihan direksi dalam sebuah perusahaan dilakukan berdasarkan profesionalitas dan bukan berdasarkan gender. Diversitas gender tidak menjadi penghalang untuk para direksi memberikan hasil perkerjaan yang berkualitas. Kehadiran direksi wanita tidak berdampak pada penurunan praktik penghindaran pajak, karena pengambilan keputusan didasarkan pada pemikiran dan perencanaan para dewan direksi.

Jumlah direksi wanita relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan total keseluruhan anggota direksi, karena kebanyakan emiten dalam sektor properti dan real estate didominasi oleh direksi pria. Rata-rata perusahaan memiliki 1 atau 2 anggota dalam dewan direksi, namun dengan jumlah direksi lebih dari 3 orang. Perbandingan ini mengakibatkan pengaruh opini dewan direksi wanita dalam pengambilan keputusan lebih sedikit. Namun menurut penelitian Tanujaya & Anggreany (2021); Aurellia & Sambuaga (2022), ditunjukkan bahwa kehadiran direksi wanita dapat meningkatkan kepatuhan dalam penagambilan keputusan. Fungsi monitoring direksi wanita juga dapat mengurangi kecurigaan pihak fiskus terhadap perusahaan.

Pengaruh conservatism terhadap tax avoidance

Temuan penelitian ini menggambarkan bahwa conservatism secara signifikan berdampak positif pada praktik tax avoidance, yang artinya penerapan conservatism dalam penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan praktik tax avoidance yang timbul dalam perusahaan. Maka dari itu, H3 yang berasumsi bahwa konservatisme akuntansi yang berdampak pada praktik tax avoidance didukung oleh hasil penelitian ini. Hal ini searah dengan penelitian Sundari & Aprilina (2017), Rosdiani & Hidayat (2020), yang menyatakan bahwa akuntansi konservatif dapat menurunkan laba perusahaan, yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Dengan kata lain, jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang minim, maka pajak yang dibayarkan juga rendah. Alasan yang mendasari hal ini adalah karena perusahaan mengakui biaya atau kerugian terlebih dahulu, dan menunda untuk mengakui pendapatan atau keuntungan. Penelitian ini tidak satu pendapat dengan Sarra (2017), yang berpendapat bahwa conservatism berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Meskipun prinsip konservatisme tidak diterapkan secara khusus untuk tujuan menghindari pajak, prinsip ini merefleksikan kecenderungan akuntan untuk memperkuat standar verifikasi untuk pengakuan keuntungan.. Hal ini berbeda dengan pendapat Pravita et al (2022), Sari et al (2021) yang mengungkapkan bahwa conservatism berdampak terhadap praktik tax avoidance.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji tingkat tax avoidance yang dipengaruhi CEO tenure, feminism in director, dan conservatism. Analisis data yang berfokus pada perusahaan real estate dan properti yang telah listing di BEI periode 2021-2023, membuktikan bahwa CEO tenure dan feminism in director tidak menunjukkan dampak signifikan akan praktik tax avoidance. Di sisi lain, conservatism secara signifikan memberikan dampak positif akan praktik tax avoidance dan secara simultan kombinasi variabel CEO tenure, feminism in director, dan conservatism berdampak kepada praktik tax avoidance.

Implikasi penelitian ini tertuju periode jabatan direktur utama dan eksistensi direksi wanita yang tidak berdampak terhadap praktik tax avoidance yang ada pada perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadikan kualitas kinerja dan pengalaman yang dimiliki calon direktur sebagai alat ukur untuk menilai apakah individu layak menempati posisi tersebut. Kemudian penerapan akuntansi konservatif pada perusahaan yang dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak. Untuk itu diharapkan pihak fiskus dapat lebih ketat dan selektif dalam mengawasi setiap perusahaan dalam kepatuhannya memenuhi kewajiban perpajakan.

Terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti, yaitu: terdapat kekurangan informasi dalam data yang disajikan oleh beberapa perusahaan sehingga penggunaan data sampel observasi tidak sesuai dengan rencana awal. Hasil pengujian menunjukkan terdapat

90,8% pengaruh variabel independen lainnya yang tidak ada dalam studi ini. Untuk itu dalam penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel bebas lain, seperti pengalaman direksi dan kualitas kepemimpinan, serta memperluas cakupan sektor dan periode penelitian untuk mendapatkan sampel observasi yang lebih banyak dan hasil yang lebih valid.

Referensi

- Afriani, N., Zulpahmi, Sumardi. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 40-56. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1255>
- Aurellia, S., Sambuaga, A., E. (2022). Pengaruh Diversitas Gender Pada Dewan dan Kualitas Audit terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi IX*, 9(1). <https://ojs.uph.edu/index.php/KIA9/article/view/5595/0>
- Bianca, M., T., Tang, S. (2018). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Karakteristik Perusahaan, Dan Karakteristik Direktur Terhadap Penghindaran Pajak. *Global Financial Accounting Journal*, 2(2), 54-69. Retrieved from <https://journal.uib.ac.id/index.php/gfa/article/view/390>
- Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022). *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 197–218. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1191>
- Hoseini, M., & Gerayli, M. S. (2018). The Presence of Women on the Board and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. In *International Journal of Finance and Managerial Accounting* (Vol. 3, Issue 9).
- Hudha, B., Utomo, C., D. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1-10. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30186>
- Limanseto, H. (2023). Pelemahan Ekonomi Dunia Berdampak pada Sektor Properti, Pemerintah Siapkan Insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) dan Bantuan Biaya Administrasi Bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Retrieved from <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5440/pelemahan-ekonomi-dunia-berdampak-pada-sektor-properti-pemerintah-siapkan-insentif-ppn-dtp-ditanggung->
- Mala, N., N. Ardiyanto, D. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Dan Ukuran Dewan Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1-11. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/30237/0>
- Noviawan, L. A., & Utamie, D. N. (n.d.). PENGARUH MANAGERIAL TENURE TERHADAP TAX AVOIDANCE. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 3, Issue 1).
- Nurmayanti, P. (n.d.). Karakteristik Chief Executive Officer (CEO) dan Kualitas Akrua: Bukti Empiris dari Indonesia. In *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* (Vol. 3, Issue 1). www.jaga.unand.ac.id
- Nursida, N., Pratami, Y., Ade Fitasari, R. M., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Riau, U. (n.d.). PENGARUH CEO TENURE, MULTINATIONAL COMPANY, INTENSITAS ASET TETAP DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. 6(3), 2022.
- Pravita, F., Ferawati, I. W., & Iqbal, A. (2022). Pengaruh Tax expert, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax avoidance. *InFestasi*, 18(2), Inpress. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.15139>

- Reinelda Tri Yunarni, B., Hadi, S., Eikman, A., Hidayati Indra Ningsih, N., & Muhammadiyah Mataram, U. (2024). THE INFLUENCE OF WOMEN LEADERS IN GREEN BUSINESS STRATEGIC DECISION MAKING. In *Jurnal of Applied Business and Banking (JABB)* (Vol. 5).
- Rosdiani dan Angga Hidayat, N. (2020). *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2). www.idx.co.id
- Sari, N., Kalbuana, N., Jumadi, A. (2016). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 431-440. Retrieved from <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/7314>
- Sarra, D., H. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 63-86. Retrieved from <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/108>
- Sekretariat Pengadilan Pajak. (2023). Nomor Putusan Pengadilan Pajak: PUT-002192.25/2021/PP/M.VIB Tahun 2023. Retrieved from <https://www.setpp.kemenkeu.go.id/risalah/IndexPutusan>
- Sirén, C., Patel, P. C., Örtqvist, D., & Wincent, J. (2018). CEO burnout, managerial discretion, and firm performance: The role of CEO locus of control, structural power, and organizational factors. *Long Range Planning*, 51(6), 953–971. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2018.05.002>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, INTENSITAS ASET TETAP, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Vol. 8, Issue 1).
- Suryoyudanto, M., Rosiyana Dewi, R., & Atsil Vinandra, F. (n.d.). *IMAR Indonesian Management and Accounting Research The Effect of Characteristic CEO and Innovation on Tax Avoidance*. <https://doi.org/10.25105/imar.v22i2.16417>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>
- Tanujaya, K., & Anggreany, E. (n.d.). *Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak*.
- Wahyudi Sinduarta, P., & Wahjoe Hapsari, D. (2022). SEIKO : Journal of Management & Business Determinan Penghindaran Pajak: Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman dari Indonesia. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(3), 390–400. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2466>
- Yuwono, & Fuad. (2019). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 8(1). <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zealion Doho, S., & Budi Santoso, E. (2020). PENGARUH KARAKTERISTIK CEO, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 1(2).

Ethics declarations

Funding

The author(s) received no financial support for the research, authorship, and/or publication of this article.

Availability of data and materials

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Competing interests

No potential competing interest was reported by the authors

Cite this paper

Valensia, G., Maulidia, R., & Ikhsan, S. (2024). Pengaruh CEO tenure, feminism in director, dan conservatism terhadap tax avoidance perusahaan properti dan real estate tahun 2021-2023. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 117-130. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1320>